

RPJMD			Penetapan Isu PD (T-B.35)													Tabel T-C.25					T-C. 26	
Perumusan Visi	Perumusan Misi	Tujuan	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					Strategi	Arah Kebijakan						
										2019	2020	2021	2022	2023								
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat	Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapabilitas aparatur daerah	(1) Pengawasan Internal belum berjalan dengan baik.  (2) Belum semua OPD berpredikat bebas korupsi/ membangun wilayah bebas korupsi	(1). Sistem Pengawasan Internal masih kurang memadai;  Kurangnya memadainya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  (1). Profesionalisme Teraga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan masih kurang;  (2). Masih belum efektifnya Pemberantasan Korupsi.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	40%	50%	60%	70%	90%	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan instrumen masyarakat serta memperkuat kelembagaan pemeriksaan investigatif kasus/	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal berbasis risiko dalam rangka meningkatkan Manajemen risiko dan pengendalian internal, serta Meningkatkan peran Inspektorat Service Centr serta media lainnya termasuk						







Perangkat Daerah (PD)																		
Kode	Program/Kegiatan	Indikator		Formula Indikator	Capaian awal tahun	T-C.27											Lokasi	
		Output	Output/ Outcome			2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	Jumlah rekomendasi yang selesai/ tuntas dibanding jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan (Termasuk hasil pengawasan BPK, BPKP, dst)	76%	85%		85%		85%		90%		90%				
			Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	Jumlah Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh kasus/ pengaduan yang masuk atau seharusnya ditangani	90%	90%	2.274.310.000	90%	2.270.000.000	90%	2.425.493.000	90%	2.581.664.000	90%	2.719.663.000	100%	12.271.130.000	
			Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP B dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah	55%	75%		78%		80%		83%		85%		85%		
17,001	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjuti Pengawasan Secara Berkala	Jumlah LHP/P2HP Pemeriksaan reguler	Persentase LHP reguler Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	Jumlah LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan dibandingkan dengan yang seharusnya diterbitkan sesuai PKROT	90%	90%	939.275.000	90%	1.100.000.000	90%	1.150.000.000	95%	1.250.000.000	95%	1.300.000.000	5.739.275.000		
17,005	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah DTP yang disusun	Persentase Daftar Temuan Pemeriksaan (DTP) yang disusun	Jumlah DTP yang disusun dibandingkan Seluruh DTP yang harus disusun berdasarkan hasil inventarisasi	90%	90%	15.000.000	90%	20.000.000	90%	30.000.000	95%	35.000.000	95%	40.000.000	140.000.000		
17,006	Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil pembahasan tindaklanjuti yang disusun	Persentase Laporan hasil tindaklanjuti yang disusun	Jumlah Laporan Hasil pembahasan tindaklanjuti yang disusun dibandingkan yang seharusnya dilakukan pembahasan tindaklanjuti	76%	85%	63.640.000	85%	65.000.000	85%	75.000.000	90%	80.000.000	90%	85.000.000	368.640.000		
17,007	Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun	Jumlah laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	350.000.000	
17,008	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan iktisat dan kebijakan pengawasan yang disusun	Jumlah Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan iktisat dan kebijakan pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan iktisat dan kebijakan pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	80.000.000	2 dokumen	290.000.000	
17,009	Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya	Jumlah kasus/pengaduan yang berkadat pengawasan dilingkup pemerintahan yang ditangani	Jumlah kasus/pengaduan yang dilingkup pemerintahan yang diperiksa	Jumlah kasus/pengaduan yang berkadat pengawasan dilingkup pemerintahan yang ditangani	70	70	154.345.000	70	200.000.000	70	227.493.000	80	231.664.000	80	254.663.000	350	1.068.165.000	
17,012	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Jumlah ISAKIP PD yang dievaluasi	Persentase ISAKIP PD yang dievaluasi	Jumlah ISAKIP PD yang dievaluasi dibanding jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SAKIP	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	70.000.000	100%	90.000.000	100%	333.000.000	
17,014	Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)	Jumlah peta pengawasan/audit universe terupdate	Persentase peta pengawasan/audit universe terupdate	Jumlah peta pengawasan/audit universe terupdate dibanding seluruh peta pengawasan	100%	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	180.000.000	

17,015	Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) PDTT yang diterbitkan	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	Jumlah LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) PDTT yang diterbitkan dibandingkan dengan yang seharusnya diterbitkan sesuai PKPT	100%	100%	574.570.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.574.570.000
17,016	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan	Jumlah laporan QA yang dikeluarkan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan pengendalian mutu	Jumlah laporan QA yang dikeluarkan dibandingkan jumlah yang seharusnya dilakukan QA	100%	100%	63.480.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	263.480.000
17,017	Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen laporan hasil evaluasi RB	Jumlah laporan hasil evaluasi RB	Jumlah Dokumen laporan hasil evaluasi RB	4 laporan	4 laporan	30.000.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	230.000.000
17,018	Review Dokumen SAKIP Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil revidu dokumen SAKIP	Persentase revidu dokumen SAKIP Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil revidu dokumen SAKIP dibanding jumlah dokumen SAKIP yang harus dilakukan revidu	100%	100%	90.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	750.000.000
17,019	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil revidu laporan keuangan daerah Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil revidu laporan keuangan daerah	Jumlah laporan hasil revidu laporan keuangan daerah Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	90.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	490.000.000
17,020	Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Persentase revidu dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil revidu dokumen penganggaran dibanding jumlah dokumen penganggaran yang harus dilakukan revidu	100%	100%	94.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	494.000.000
20	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>		<b>Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/SPIP sesuai ketentuan</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan dokumen Manajemen risiko/SPIP dibandingkan Seluruh Perangkat Daerah</b>	63%	68,76%	165.785.000	70%	250.000.000	75%	250.000.000	75%	250.000.000	80%	1.185.785.000
20,005	Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP	Jumlah PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan	Persentase PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan	Jumlah PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan dibanding seluruh OPD	100%	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	265.000.000
20,006	Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee	Jumlah Pembinaan yang diselenggarakan	Persentase pembinaan yang diselenggarakan tentang ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Pembinaan yang diselenggarakan dibanding jumlah Pembinaan	100%	100%	120.785.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	920.785.000
18	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan</b>		<b>Persentase APIP berkompetensi sesuai standar kompetensi APIP</b>	<b>Jumlah Personil APIP yang memenuhi standar kompetensi dibanding seluruh jumlah personil pengawasan</b>	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000
18,001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah pelatihan yang diikuti	Persentase pelatihan yang diselenggarakan	Jumlah pelatihan yang diikuti dibanding dengan target pelatihan	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000
19	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>		<b>Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP</b>	<b>Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP dibanding target Seluruh AOI yang ditargetkan</b>	80%	85%	64.460.000	85%	145.000.000	85%	170.000.000	85%	195.000.000	90%	794.460.000
19,002	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen/kebijakan pengawasan yang disusun sesuai standar	Persentase penyusunan kebijakan pengawasan sesuai standar	Jumlah dokumen/kebijakan pengawasan yang disusun sesuai standar dibanding yang seharusnya disusun	80%	85%	24.500.000	85%	45.000.000	85%	70.000.000	85%	95.000.000	90%	354.500.000
19,003	Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal	Jumlah aplikasi sistem informasi pengawasan yang diselenggarakan secara efektif	Jumlah aplikasi sistem informasi pengawasan yang diselenggarakan secara efektif	Jumlah aplikasi sistem informasi pengawasan yang diselenggarakan secara efektif	3 SIP	3 SIP	39.960.000	3 SIP	100.000.000	3 SIP	100.000.000	3 SIP	100.000.000	3 SIP	439.960.000

21	Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi		1) Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK 2) Persentase Perangkat Daerah melaksanakan aksi pemenuhan dan pencegahan pemberantasan korupsi	1) Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat 2) Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/ 2 dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat	14% dan 100%	57%	406.515.000	14% dan 100%	455.000.000	43% dan 100%	455.000.000	43% dan 100%	457.000.000	100%	462.000.000	100%	2.235.515.000
21.001	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi	Jumlah kasus TPTGR berkadar pengawasan yang ditangani	Persentase kasus TPTGR yang diproses	Jumlah kasus TPTGR berkadar pengawasan yang ditangani dibanding yang masuk	100%	100%	61.515.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	361.515.000
21.002	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK Persentase yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dibanding target	100% PD yang terlibat	100% PD yang terlibat	115.000.000	100% PD yang terlibat	100.000.000	100% PD yang terlibat	100.000.000	100% PD yang terlibat	102.000.000	100% PD yang terlibat	102.000.000	100% PD yang terlibat	519.000.000
21.003	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Jumlah pemenuhan aksi/ program kerja Saber Pungli dan UPG	Persentase pemenuhan aksi/ program kerja Saber Pungli dan UPG	Jumlah pemenuhan aksi/ program kerja Saber Pungli dan UPG dibanding Seluruh aksi	100%	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	870.000.000
21.004	Operasional Penyelenggaraan Tugas TP4D	Jumlah dokumen laporan TP4D yang disusun	Jumlah laporan TP4D yang disusun	Jumlah dokumen laporan TP4D yang disusun	2 laporan	2 laporan	80.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	105.000.000	10 laporan	485.000.000
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (kegiatan rutin)		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah aktivitas operasional dibanding target	88,06%	88,2%	858.210.000	88,4%	900.000.000	88,6%	990.000.000	88,8%	1.089.000.000	90%	1.197.900.000	90%	5.035.110.000
01.021	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	11	11	858.210.000	11	900.000.000	11	990.000.000	11	1.089.000.000	11	1.197.900.000	11	5.035.110.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (kegiatan rutin)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana APIP dibanding standarisasi sarana dan prasarana	88,32%	88,4%	512.720.000	88,6%	600.000.000	88,8%	660.000.000	88,9%	726.000.000	90%	798.600.000	90%	3.297.320.000
02.045	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang disediakan	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang disediakan	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang disediakan	4	4	174.000.000	4	250.000.000	4	275.000.000	4	302.500.000	4	332.750.000	16	1.334.250.000
02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara	2	2	338.720.000	2	350.000.000	2	385.000.000	2	423.500.000	2	465.850.000	10	1.963.070.000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (kegiatan rutin)		Persentase LKJ yang diterbitkan	Jumlah LKJ yang disusun dibanding LKJ yang seharusnya disusun	100%	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.300.000	100%	3.630.000	100%	3.993.000	100%	16.923.000
06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.300.000	1 dokumen	3.630.000	1 dokumen	3.993.000	5 dokumen	16.923.000
06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.300.000	1 dokumen	3.630.000	1 dokumen	3.993.000	5 dokumen	16.923.000
06.003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.050.000	1 dokumen	6.655.000	5 dokumen	28.205.000

06.007	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	-	-	-	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	27.500.000	2 dokumen	30.250.000	2 dokumen	33.275.000	8 dokumen	116.025.000	
06.007	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	-	-	-	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	27.500.000	2 dokumen	30.250.000	2 dokumen	33.275.000	8 dokumen	116.025.000	